

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintah, Indonesia terbagi sebagian wilayah provinsi dan dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Pembangunan daerah jadi faktor menyeluruh atas ekspansi nasional pada dasarnya guna mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah akibatnya terwujud suatu keahlian yang kompeten untuk memimpin pemerintahan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pembangunan daerah juga berarti memberi keluasaan terhadap daerah untuk mengatur sumber daya ekonomi secara menguntungkan dan efisien bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pembangunan daerah dapat terjadi melalui dua pendekatan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengelolaan terpusat artinya pelaksanaan pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pusat dan dilaksanakan oleh pejabat pusat. Namun dalam pendekatan desentralisasi, pembangunan daerah pada dasarnya menjadi tanggung jawab daerah dan dilaksanakan secara otonom oleh daerah (pemda). Adanya bantuan otonomi daerah kepada daerah dapat memberikan peluang bagi daerah untuk berkembang melalui perusahaan yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Ciri – ciri suatu daerah sanggup melangsungkan otonomi yakni, dalam kemahiran keuangan daerah maksudnya daerah harus mempunyai hak dan kapabilitas dalam mencari sumber keuangan, mengelola dan memakai keuangan sendiri yang mencukupi guna penyelenggara pemerintah. Pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan kemampuan yang ada tanpa melanggar ketentuan. PAD sebagai penerima daerah, menggambarkan tingkat otonomi daerah. Bertambah besar PAD maka semakin menandakan kemampuan daerah dalam melakukan distribusi pajak dan bergantung pada pemerintah menurun. Pada peraturan distribusi dan otonomi daerah dalam UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang peninjauan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh fungsi guna memenuhi keperluan setiap daerah sendiri.

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, akan berdampak pada struktur APBD antara lain perubahan APBD. Kerangka APBD yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang otonomi daerah adalah anggaran bertimbang, artinya jumlah penerima atau pendapatan sama dengan jumlah belanja atau pengeluaran. Penyusunan APBD saat ini berubah sesuai keuangan daerah, bukan anggaran berimbang. Yakni, setiap daerah mempunyai perbedaan bentuk APBD dengan kinerja keuangan atau pendapatan suatu daerah tersebut. Adapun bentuk baru APBD berlandaskan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan

Dalam setiap pembentukan APBD, ketiga bagian itu harus ada. Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya PDRB total keseluruhan nilai barang dan jasa yang didapat dari seluruh aktivitas perekonomian yang dilaksanakan di daerah. Penghitungan PDRB melibatkan dua pendekatan penetapan harga yang berbeda: PDRB berdasarkan nilai berlaku dan PDRB berdasarkan nilai konstan. Penentuan nilai tambah barang dan jasa setiap tahun beserta menggunakan harga berlaku disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan produk domestik regional bruto (PDRB) yang berkesinambungan inilah yang menentukan struktur perekonomian.

Selain itu yang dapat menaikkan pendapatan asli daerah juga jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata. Jumlah objek wisata dapat menaikkan jumlah kunjungan wisata. Semakin banyak objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta maka kunjungan wisata semakin bertambah dan naik. Jika kondisi infrastruktur di daerah baik maka berdampak pada kestabilan perekonomian daerah. Kondisi jalan yang baik dapat mendukung minat wisatawan ke objek wisata. Sebaliknya jika kondisi jalan yang tidak baik maka wisatawan membatalkan untuk pergi ke objek wisata, sehingga pendapatan retribusi pariwisata juga menurun.

Tabel 1.1

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 – 2022

Tahun	PAD
2016	1.673.749,20
2017	1.851.973,40
2018	2.040.723,25
2019	2.082.795,33
2020	1.876.706,83
2021	1.900.923,07
2022	2.263.431,32

Sumber: BAPPEDA DIY

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 sampai 2019 Pendapatan Asli Daerah menghadapi peningkatan yang cukup di tahun 2020 dan 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang disebabkan karena pandemic covid-19. Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup karena bertambahnya jumlah wisatawan dan objek wisata yang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan gambaran kondisi perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis mencoba menganalisis antara variabel yaitu PDRB, belanja daerah, jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata dalam hal ini ialah, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis tentang kaitan tersebut diringkas pada sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Daerah, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Objek Wisata terhadap PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB, belanja daerah, jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata terhadap PAD di Provinsi DIY?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1.2.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, belanja daerah, jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata terhadap PAD di Provinsi DIY

1.2.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Informasi mengenai penelitian ekonomi seperti PAD dapat diberikan untuk tujuan teoritis atau ilmiah. dan mampu menyebarkan ilmu pengetahuan. Tentang pengaruh PDRB, belanja daerah, jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata terhadap PAD.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai PAD

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan bagi pembentuk kebijakan yaitu pemerintah daerah yang bersangkutan dengan PAD pada upaya meningkatkan perekonomian daerah berakibat tercapainya kesdamaian yang adil dan makmur
- b. Memberikan informasi tentang sumber PAD.